

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Laporan Posisi Keuangan.....	13
Gambar 2.2 Laporan Penghasilan Komprehensif.....	15
Gambar 2.3 Laporan Perubahan Aset Neto.....	16
Gambar 2.4 Laporan Arus Kas.....	19
Gambar 2.5 Catatan Atas Laporan Keuangan.....	22
Gambar 3.6.1 Model Analisis Interaktif Miles & Huberman.....	39
Gambar 4.2 Struktur Organisasi SDN 001 Kabun.....	37

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik. Dalam pengelolaan Dana BOS, akuntabilitas dan transparansi menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh setiap lembaga pendidikan, termasuk SD Negeri 013 Tambusai Utara. Agar pelaporan keuangan Dana BOS sesuai dengan standar yang berlaku, penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) menjadi sangat penting.

Organisasi nirlaba adalah lembaga penyedia jasa yang memiliki karakteristik berbeda dari organisasi swasta. Tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan sebagainya. Tidak seperti organisasi profit yang berorientasi pada pencapaian keuntungan, organisasi nirlaba lebih menekankan pada pelayanan. Sumber daya manusia dianggap sebagai aset utama dalam organisasi ini, karena seluruh kegiatannya berpusat pada manusia dan dilakukan oleh, dari, serta untuk masyarakat.

Istilah "nirlaba" dianggap kurang tepat karena mengandung arti negatif atau kebalikan dari kegiatan profit. Oleh karena itu, istilah tersebut diganti

menjadi "nirlaba" yang dinilai lebih sesuai. Pergantian ini juga diiringi dengan pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 45, yang sebelumnya mengatur penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba. Sebagai penggantinya, ISAK 35 disahkan untuk menggantikan SAK No. 45, dengan penyesuaian sesuai amandemen PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2019). Standar akuntansi berfungsi sebagai pedoman umum yang memberikan arahan dalam penyusunan laporan keuangan dan merupakan pernyataan resmi terkait berbagai isu akuntansi.

Organisasi nonlaba di Indonesia cenderung lebih fokus pada kualitas program dibandingkan penyajian laporan keuangan. Padahal, pengelolaan keuangan yang baik merupakan indikator utama akuntabilitas dan transparansi sebuah lembaga. Untuk mencapai pengendalian keuangan yang optimal, diperlukan tenaga kerja yang memahami pembuatan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu ISAK 35. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35, yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 11 April 2019, menggantikan PSAK 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dalam ISAK 35, istilah "nirlaba" diganti menjadi "nonlaba" untuk menegaskan bahwa aktivitas utama organisasi tersebut tidak berorientasi pada pencarian keuntungan.

Setiap sekolah yang mengelola Dana BOS, baik negeri maupun swasta, memiliki kewajiban untuk menerapkan standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Salah satu standar yang harus

diikuti adalah ISAK 35, yang mengatur penyusunan laporan keuangan bagi entitas nirlaba, termasuk sekolah. Penerapan ISAK 35 bertujuan untuk memastikan laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kondisi keuangan yang jelas, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini sangat penting agar pengelolaan Dana BOS dapat dipertanggungjawabkan dengan tepat kepada pihak pemberi dana (pemerintah) serta masyarakat yang menerima manfaat dari program pendidikan. Oleh karena itu, penerapan ISAK 35 merupakan kewajiban bagi seluruh lembaga pendidikan yang menerima Dana BOS, tidak hanya di SDN 013 Tambusai Utara, untuk memastikan pengelolaan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Peraturan Menteri pendidikan no 80 tahun 2016 mengenai petunjuk teknis penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Sekolah adalah salah satu jenis organisasi nonlaba yang umum dan mudah ditemukan di berbagai wilayah. Dalam operasionalnya, sekolah juga perlu melakukan pengelolaan keuangan, yang bersumber dari dana BOS serta kontribusi orang tua atau wali siswa di SDN 013 Tambusai Utara.

Sekolah Dasar Negeri 013 Tambusai Utara adalah salah satu sekolah di Kecamatan Tambusai Utara yang telah menerapkan sistem pencatatan laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pencatatan laporan keuangan di sekolah tersebut sudah sesuai dengan standar yang digunakan dalam penelitian, yaitu ISAK 35. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, menurut bendahara SDN 013 Tambusai Utara

pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas pada dana BOS sudah menggunakan Aplikasi RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah).

Namun fenomena yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri 013 Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu yaitu laporan keuangannya belum menyajikan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 yang terdiri dari 5 laporan keuangan yaitu : 1). laporan posisi keuangan, 2). laporan penghasilan komprehensif, 3). laporan perubahan aset neto, 4). laporan arus kas, 5). catatan atas laporan keuangan. Di sekolah SDN 013 Tambusai Utara ini hanya menyajikan laporan keuangan realisasi anggaran saja, dengan hal tersebut saya hanya bisa menyusun laporan aktivitas untuk satu periode pelaporan.

Dalam penelitian terdahulu menurut (Dewi & Herawati, 2023) bahwa Yayasan Santha Yana belum menerapkan ISAK 35 dalam penyajian laporan keuangan, laporan yang disajikan hanya berisi informasi mengenai pendapatan, beban, dan selisih antara pendapatan dan beban.

Dalam peneliti terdahulu menurut (Anggi Sutisna & Elan Eriswanto, 2024) SMP Negeri 1 Cibitung belum menerapkan atau membuat laporan keuangan sesuai ISAK 35, namun SMP Negeri 1 Cibitung sudah menerapkan ARKAS dalam pembuatan laporan keuangan dana BOS namun masih terdapat kendala dalam penerapannya.

Dalam penelitian terdahulu menurut (Fatimah raihania putri, 2021) penyajian laporan keuangan organisasi non laba (studi kasus pada masjid Al-Ma'ruf Samarinda) belum menerapkan ISAK 35, pencatatan keuangan masih

dilakukan secara sederhana yaitu hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran masjid.

Pada penelitian terdahulu menurut (Robert, 2017) menunjukkan bahwa laporan keuangan Stasi St. Ptrus hanya berupa laporan penerimaan dan pengeluaran kas, sehingga belum sesuai dengan standar yang berlaku yaitu ISAK 35.

Dalam penelitian terdahulu menurut (Ali & Lamaya, 2023) bahwa Takmir Masjid Darussalam Sikumana Kota Kupang mengelola keuangan masjid dengan baik namun laporan keuangannya belum sesuai standar yakni ISAK 35 dan PSAK 109. Selain itu Taakmir Masjid Darussalam Sikumana Kota Kupang telah mengelola keuangan masjid dengan transparan dan akuntabel. Kegiatan yang dilakukan oleh Takmir Masjid, diantaranya mempublikasikan semua proses dalam tahapan pengelolaan keuangan masjid kepada para jamaah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan ISAK 35 Pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Studi Kasus di SDN 013 Tambusai Utara, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu”**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalahnya yaitu : Apakah Laporan Keuangan pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 013 Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu telah sesuai dengan ISAK 35 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah : Untuk menganalisa laporan keuangan pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 013 Tambusai Utara, Kec.Tambusai Utara, Kab.Rokan Hulu dengan standar pencatatan keuangan ISAK 35.

1.4 Manfaat penelitian

Dari penelitian ini, adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis: Hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru tentang penerapan ISAK 35 dalam pengelolaan dana BOS. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam konteks penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35 pada dana BOS.
2. Secara Praktis: Karya ilmiah ini sebagai persyaratan akademisi untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Pasir Pengaraian.
3. Bagi Sekolah: Membantu sekolah memeriksa kembali pencatatan laporan keuangan apakah sudah berjalan dengan efektif atau belum.

4. Bagi Pemerintah: Membantu pemerintah dalam menganalisa programnya dan menjadi bahan acuan program dana BOS untuk pelaksanaan berikutnya.

1.5 Batasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Batasan Masalah

Pembahasan masalah sangat diperlukan dalam penulisan penelitian ini. Karena luasnya objek yang dipilih untuk dikaji, terbatasnya waktu dan kurangnya kemampuan, maka pada pembahasan ini akan diberikan Batasan masalah agar tidak dapat menimbulkan perluasan masalah yang diteliti sehingga tidak jelas dalam penyelesaian penelitian ini. Maka peneliti membatasi hanya pada Penerapan ISAK 35 pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) : Studi kasus di SDN 013 Tambusai Utara, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, serta Pembuatan Laporan Keuangan untuk tahun 2023 yang telah disesuaikan dengan juknis.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini mengadaptasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Anggi Sulistina & Elan Eriswanto yang berjudul “ Analisis Penerapan Laporan Keuangan Menurut Isak 35 dan Penerapan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS). Pada Mei 2024, dengan objek penelitian di Sukabumi. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam hal lokasi, periode.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terstruktur dan mudah dipahami, penulis menyusun isi penelitian kedalam beberapa bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang aspek awal penelitian, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan dan originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis, kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini mengkaji tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi data, hasil pengujian, serta pembahasan terkait temuan penelitian yang telah dianalisis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat memberikan kontribusi lebih lanjut dalam pengembangan kajian terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Teori keagenan (*agency theory*) menggambarkan hubungan yang terjadi ketika seseorang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen dan Meckling dalam Luayyi, 2010). Sekolah, sebagai pihak yang diberikan wewenang dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana BOS, harus mempertanggungjawabkan dan transparan mengenai segala aktivitas dan kinerja kepada pemberi amanah, seperti Dinas Pendidikan dan masyarakat. Konflik antara *principal* dan *agent* sering kali muncul akibat perbedaan kepentingan, karena sekolah yang secara langsung mengelola dana BOS cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, sekolah diberikan wewenang untuk mengambil keputusan, dan dalam hal ini, tim manajemen BOS diharapkan dapat mengelola dana BOS secara optimal.

2.1.2 Pengertian Aplikasi RKAS

Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk memfasilitasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) di satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional.

Pada tanggal 7 Agustus 2023 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi merilis secara nasional Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) versi 4. RKAS versi 4 merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya yaitu RKAS versi 3 dengan tiga pilar kemudahan yaitu lebih praktis, lebih nyaman, dan lebih aman.

2.1.3 Juknis BOS

Disdikpora – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Aturan baru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, sebagai pengganti dari aturan sebelumnya yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek, yaitu Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2022 dan revisinya pada 2023. Juknis BOSP 2025 ini dimaksudkan untuk menjamin hak akses pendidikan melalui satuan pendidikan yang dapat mewujudkan layanan pendidikan bermutu untuk semua, sekaligus untuk menjawab dinamika perkembangan sistem pendidikan nasional, termasuk penyesuaian mekanisme penyaluran, penggunaan, serta pertanggungjawaban dana agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

Dana BOSP terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan tingkat dan jenis satuan pendidikan:

- Dana BOP PAUD Reguler dan Kinerja
- Dana BOS Reguler dan Kinerja (untuk SD, SMP, dan SMPLB)
- Dana BOP Kesetaraan Reguler dan Kinerja (untuk Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

Penerima Dana BOS Reguler harus memenuhi persyaratan:

1. memiliki NPSN yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
2. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya;
3. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
4. memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan;
5. tidak merupakan Satuan Pendidikan kerja sama; dan
6. tidak merupakan Satuan Pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain.

2.1.4 Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan

Dana BOS

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
2. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

3. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
4. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disebut SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

Pasal 2

Petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS dimaksudkan untuk memberikan acuan/pedoman bagi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah.

Pasal 3

- a. program BOS SD dan SMP bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada satuan pendidikan-satuan pendidikan yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan-satuan pendidikan yang sudah memenuhi SPM; dan
- b. program BOS SMA dan SMK bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat.

Pengelolaan Dana BOS dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. **Transparansi:** Pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara transparan dan terbuka, sehingga semua pihak yang terkait dapat mengetahui bagaimana dana BOS digunakan.
2. **Akuntabilitas:** Pengelolaan dana BOS harus dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan, sehingga semua penggunaan dana BOS dapat dijelaskan dan dibuktikan.
3. **Efisiensi:** Pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara efisien, sehingga dana BOS dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan.

4. Efektivitas: Pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara efektif, sehingga dana BOS dapat memberikan hasil yang maksimal untuk mencapai tujuan pendidikan.

Komponen Penggunaan Dana BOS, Dana BOS dapat digunakan untuk beberapa komponen, antara lain:

1. Biaya operasional sekolah: Dana BOS dapat digunakan untuk biaya operasional sekolah, seperti biaya listrik, air, dan lain-lain.
2. Pengembangan sarana dan prasarana: Dana BOS dapat digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah, seperti pembangunan ruang kelas, laboratorium, dan lain-lain.
3. Pengembangan kualitas guru: Dana BOS dapat digunakan untuk pengembangan kualitas guru, seperti pelatihan guru, workshop, dan lain-lain.
4. Kegiatan ekstrakurikuler: Dana BOS dapat digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler, seperti olahraga, seni, dan lain-lain.

Prosedur Pengelolaan Dana BOS, Prosedur pengelolaan dana BOS meliputi:

1. Perencanaan: Sekolah harus membuat rencana penggunaan dana BOS yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.
2. Pengajuan: Sekolah harus mengajukan proposal penggunaan dana BOS kepada dinas pendidikan setempat.
3. Pencairan: Dana BOS dicairkan kepada sekolah setelah proposal disetujui.

4. Penggunaan: Sekolah menggunakan dana BOS sesuai dengan rencana dan proposal yang telah disetujui.
5. Pertanggungjawaban: Sekolah harus membuat laporan penggunaan dana BOS dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS kepada dinas pendidikan setempat.

2.1.5 Standar Keuangan Berdasarkan ISAK 35

1. Pengertian ISAK 35

ISAK 35 adalah standar akuntansi keuangan yang termasuk kategori baru, yang disahkan pada 11 April 2019 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020. Setiap sekolah yang mengelola Dana BOS, baik negeri maupun swasta, memiliki kewajiban untuk menerapkan standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Salah satu standar yang harus diikuti adalah ISAK 35, yang mengatur penyusunan laporan keuangan bagi entitas nirlaba, termasuk sekolah. Penerapan ISAK 35 bertujuan untuk memastikan laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kondisi keuangan yang jelas, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini sangat penting agar pengelolaan Dana BOS dapat dipertanggungjawabkan dengan tepat kepada pihak pemberi dana (pemerintah) serta masyarakat yang menerima manfaat dari program pendidikan. Oleh karena itu, penerapan ISAK 35 merupakan kewajiban bagi seluruh lembaga pendidikan yang menerima Dana BOS, tidak hanya di SDN 013 Tambusai Utara, untuk memastikan pengelolaan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Peraturan Menteri pendidikan no 80 tahun 2016

mengenai petunjuk teknis penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

ISAK 35 menetapkan prinsip-prinsip akuntansi dan tata cara pelaporan keuangan untuk organisasi nonlaba, seperti sekolah, Yayasan, Lembaga sosial, Lembaga agama. ISAK 35 memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh organisasi nonlaba dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya, sehingga dapat memperoleh informasi yang relevan dan dapat dipercaya bagi para pengguna laporan keuangan (Indonesia, 2017). Bersamaan dengan pengesahan ISAK 35, Dewan Standar Akuntansi Keuangan juga mengeluarkan PPSAK 13, yang mencabut PSAK 45 mengenai pelaporan keuangan entitas nirlaba. Laporan keuangan untuk organisasi nonlaba dijelaskan dalam Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 35 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nonlaba. Organisasi nonlaba memiliki ciri khas yang berbeda dari organisasi bisnis pada umumnya, terutama dalam cara mereka memperoleh sumber daya. Sumber daya yang diperoleh oleh organisasi nonlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan keuntungan.

IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) telah menetapkan pedoman untuk penyajian laporan keuangan organisasi non-profit yang sebelumnya diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Indonesia (DSAK IAI). Pada 11 April 2019, PSAK 45 digantikan oleh Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35, yang berlaku untuk entitas nonlaba pada tahun buku dengan efektif mulai 1 Januari 2020 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

2. Tujuan dan Manfaat ISAK 35

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), tujuan dan manfaat dari Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 tentang akuntansi nirlaba adalah sebagai berikut: (1) Memberikan pedoman yang jelas dan rinci mengenai akuntansi nirlaba sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi yang disajikan dengan lebih baik. (2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan nirlaba, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*). (3) Menyediakan informasi yang lebih relevan, dapat diandalkan, dan konsisten untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan. (4) Memperkuat prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, menciptakan standar akuntansi yang lebih konsisten dan harmonis. (5) Menyusun pelaporan keuangan nirlaba yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan serta tujuan organisasi nirlaba. (6) Meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan nirlaba, termasuk informasi terkait pengeluaran operasional dan non-operasional, dana restrukturisasi, dan dana yang tidak terikat (Indonesia, 2018).

3. Landasan Hukum ISAK 35

(1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur dalam Pasal 10 ayat (2) bahwa "penggunaan keuangan negara harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis". (2) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mengatur akuntansi sektor publik, termasuk akuntansi nirlaba. (3) Standar

Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. (4) Standar Profesional Akuntan Indonesia (SPAI), yang diterbitkan oleh IAI, adalah standar etika dan perilaku yang harus dipatuhi oleh akuntan dalam menjalankan profesinya (IKATAN AKUNTAN INDONESIA, 2020).

ISAK 35 adalah Interpretasi dari Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). ISAK 35 mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba dan merupakan Implementasi dari PSAK 1 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Yang disahkan pada 11 April 2019 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020.

2.1.6 Laporan Keuangan Entitas Nonlaba Sesuai Standar ISAK 35

a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan dalam draf eksposur ISAK 35 disajikan dalam dua format, yaitu Format A dan Format B. Berbeda dengan laporan posisi keuangan pada umumnya, laporan ini dirancang khusus untuk entitas nirlaba, dengan komponen aset yang disusun berdasarkan kondisi tertentu. Kondisi tersebut terkait dengan penyajian aset yang memiliki pembatasan atau tidak memiliki pembatasan, sesuai dengan jenis aset yang diakui berdasarkan persyaratan tertentu. Terdapat 2 (Format) laporan posisi keuangan yang disajikan sebagai contoh dalam lampiran :

- 1) Format A, laporan posisi keuangan menyajikan informasi mengenai pos penghasilan komprehensif lain secara terpisah sebagai bagian dari aset neto tanpa pembatasan. Namun, jika aset tersebut memiliki pembatasan, maka penyajiannya disesuaikan dengan kategori aset netonya.
- 2) Format B tidak menyajikan pos penghasilan komprehensif lain secara terpisah.

a. Aset

Sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diperoleh entitas.

- 1) Kas dan setara kas.
- 2) Piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa lain.
- 3) Persediaan.
- 4) Sewa, asuransi, dan jasa lain yang dibayar dimuka.
- 5) Instrumen keuangan dan investasi jangka Panjang.
- 6) Tanah, gedung, peralatan, serta aset tetap lain yang digunakan untuk menghasilkan barang jasa.

b. Liabilitas

Liabilitas merupakan klaim pihak ketiga terhadap aset entitas. Liabilitas disusun berdasarkan urutan waktu jatuh temponya. Kewajiban yang jatuh temponya kurang dari satu tahun digolongkan sebagai kewajiban lancar, sedangkan kewajiban yang jatuh

temponya lebih dari satu tahun digolongkan sebagai kewajiban jangka panjang.

- 1) Utang.
- 2) Pendapatan diterima dimuka.
- 3) Utang lainnya.
- 4) Utang jangka panjang.

c. Aset Neto

Aset neto umumnya merupakan selisih antara aset dan liabilitas. Namun, dalam laporan posisi keuangan entitas nonlaba, aset neto dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1) Aset neto tanpa pembatasan

Merupakan aset yang tidak memiliki batasan dalam penggunaannya. Contohnya, dana yang diperoleh dari donatur tanpa ada ketentuan tertentu, sehingga dana tersebut dapat digunakan oleh entitas untuk memenuhi berbagai kebutuhannya.

2) Aset neto dengan pembatasan

merupakan aset yang penggunaannya dibatasi oleh pemberi sumber daya. Contohnya, pemberian tanah atau bangunan untuk tujuan tertentu, seperti untuk kas anak yatim atau kas fakir miskin. Secara sederhana, donatur memberikan sumber dana dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi.

ENTITAS XYZ Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	XXXX	XXXX
Piutang jangka pendek	XXXX	XXXX
Investasi jangka pendek	XXXX	XXXX
Aset lancar lain	XXXX	XXXX
Total Aset Lancar	XXXX	XXXX
Aset Tidak Lancar		
Properti investasi	XXXX	XXXX
Investasi jangka panjang	XXXX	XXXX
Aset tetap	XXXX	XXXX
Total Aset Tidak Lancar	XXXX	XXXX
TOTAL ASET	XXXX	XXXX
LIABILITAS		
Liabilitas jangka Pendek		
Pembiayaan diterima di muka	XXXX	XXXX
Utang jangka pendek	XXXX	XXXX
Total Liabilitas jangka Pendek	XXXX	XXXX
Liabilitas jangka Panjang		
Utang jangka panjang	XXXX	XXXX
Liabilitas ambalan kerja	XXXX	XXXX
Total Liabilitas jangka Panjang	XXXX	XXXX
Total Liabilitas	XXXX	XXXX
ASET NETO		
<i>Dari pembatasan (without restrictions) dari pemberi sumber daya</i>		
Surplus akumulasi	XXXX	XXXX
Penghasilan komprehensif lain ^(*)	XXXX	XXXX
<i>Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya (catatan B)</i>	XXXX	XXXX
Total Aset Neto	XXXX	XXXX
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	XXXX	XXXX

^(*) entitas menyediakan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset, termasuk depresiasi, nilai penghasilan komprehensif lain, termasuk dari aset neto dengan pembatasan, maka diartikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan.

Sumber (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019)

Gambar 2.1 (Laporan Posisi Keuangan)

b. Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan Penghasilan Komprehensif dalam Format A disajikan dalam bentuk kolom tunggal, sehingga mempermudah penyusunan secara komparatif. Sementara itu, Laporan Penghasilan Komprehensif Lain dalam Format B disajikan berdasarkan klasifikasi aset neto, yang berbeda dari Format A. Pada

Format B, rincian aset dengan pembatasan dan tanpa pembatasan ditampilkan secara langsung per tahun, lengkap dengan jumlahnya. Penyajian dalam

Format B memberikan kemudahan untuk melihat detail klasifikasi aset pada setiap tahunnya.

Lampiran Laporan Penghasilan Komprehensif (Format A)

ENTITAS XYZ
Laporan Penghasilan Komprehensif
untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 20X1
(dalam jutaan rupiah)

	20X1	20X0
TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
<i>Pendapatan</i>		
Sales (uang)	XXXX	XXXX
Jasa layanan	XXXX	XXXX
Penghasilan investasi jangka pendek (Catatan D)	XXXX	XXXX
Penghasilan investasi jangka panjang (Catatan D)	XXXX	XXXX
Lain-lain	XXXX	XXXX
<i>Kost Pengeluaran</i>		
BEKAS		
Cost of sales	XXXX	XXXX
Jasa lain (pembelian)	XXXX	XXXX
Administrasi	XXXX	XXXX
Depresiasi	XXXX	XXXX
Lain-lain	XXXX	XXXX
<i>Net of Income Statement</i>	XXXX	XXXX
Keuntungan sebelum pajak	XXXX	XXXX
<i>Net of Income</i>	XXXX	XXXX
Surplus (Defisit)	XXXX	XXXX
DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
<i>Pendapatan</i>		
Sales (uang)	XXXX	XXXX
Penghasilan investasi jangka pendek (Catatan D)	XXXX	XXXX
<i>Kost Pengeluaran</i>		
BEKAS		
Keuntungan sebelum pajak	XXXX	XXXX
Surplus (Defisit)	XXXX	XXXX
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	XXXX	XXXX
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	XXXX	XXXX

Lampiran Laporan Penghasilan Komprehensif (Format B)

ENTITAS XYZ
Laporan Penghasilan Komprehensif
untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 20X1
(dalam jutaan rupiah)

	20X1			20X0		
	Penghasilan Komprehensif	Penghasilan Komprehensif	Penghasilan Komprehensif	Penghasilan Komprehensif	Penghasilan Komprehensif	Penghasilan Komprehensif
	Net of Income	Net of Income	Net of Income	Net of Income	Net of Income	Net of Income
PENDAPATAN						
Sales (uang)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Jasa layanan	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Penghasilan investasi jangka pendek (Catatan D)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Penghasilan investasi jangka panjang (Catatan D)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Lain-lain	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<i>Kost Pengeluaran</i>						
BEKAS						
Cost of sales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Jasa lain (pembelian)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Administrasi	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Depresiasi	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Lain-lain	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<i>Net of Income Statement</i>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Keuntungan sebelum pajak	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<i>Net of Income</i>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Surplus (Defisit)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Sumber (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019)

Gambar 2.2 (Laporan Penghasilan Komprehensif)

c. Laporan Perubahan Aset Neto

Laporan perubahan aset neto menggambarkan perubahan nilai aset berdasarkan klasifikasi sesuai dengan kondisi dan sifat aset. Kondisi tersebut mencakup aset dengan pembatasan dan tanpa pembatasan. Perubahan pada masing-masing klasifikasi aset dihitung dan disajikan dalam laporan ini. Selain itu, laporan perubahan aset neto memiliki kaitan dengan laporan penghasilan komprehensif lain. Jika penghasilan dalam laporan penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka dalam laporan perubahan aset neto penghasilan tersebut dicatat sebagai bagian dari aset dengan pembatasan.

ENTITAS XYZ Laporan Perubahan Aset Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	XXXX	XXXX
Surplus tahun berjalan	XXXX	XXXX
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	XXXX	XXXX
Saldo akhir	XXXX	XXXX
Penghasilan Komprehensif Lain		
Saldo awal	XXXX	XXXX
Penghasilan komprehensif tahun berjalan***	XXXX	XXXX
Saldo akhir	XXXX	XXXX
Total	XXXX	XXXX
ASET NETO DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	XXXX	XXXX
Surplus tahun berjalan	XXXX	XXXX
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	(XXXX)	(XXXX)
Saldo akhir	XXXX	XXXX
TOTAL ASET NETO	XXXX	XXXX

***) entitas menyediakan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya (misalnya jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

(A) Lihat Laporan Posisi Keuangan (Permata A)

(B) Lihat Laporan Posisi Keuangan (Permata B)

Sumber (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019)

Gambar 2.3 (Laporan Perubahan Aset Neto)

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas dalam draf eksposur ISAK 35 disajikan dalam dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Perbedaan utama

antara keduanya terletak pada penyajian arus kas dari aktivitas operasi. Pada metode tidak langsung, surplus atau defisit direkonsiliasi menjadi kas neto dari aktivitas operasi dan disajikan dalam bagian aktivitas operasi. Sementara itu, pada metode langsung, tidak dilakukan rekonsiliasi, melainkan langsung menyajikan rincian aktivitas operasi, seperti arus kas, bunga, dan penerimaan lainnya. Laporan arus kas terdapat beberapa informasi mengenai :

1) Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi ini berasal dari kegiatan utama yang menghasilkan pendapatan bagi entitas. Hal ini mencakup transaksi, aktivitas, dan kondisi lain yang dapat mempengaruhi laba atau rugi.

2) Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi ini didapatkan dari pengeluaran kas yang memiliki tujuan untuk mendapatkan penghasilan dimasa yang akan datang.

Contoh Laporan Arus Kas (Metode Langsung)

ENTITAS XYZ Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
AKTIVITAS OPERASI		
Kas dari sumbangan	XXXX	XXXX
Kas dari pendapatan jasa	XXXX	XXXX
Bunga yang diterima	XXXX	XXXX
Penerimaan lain-lain	XXXX	XXXX
Bunga yang dibayarkan	XXXX	XXXX
Kas yang dibayarkan kepada karyawan	XXXX	XXXX
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
AKTIVITAS INVESTASI		
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	XXXX	XXXX
Pembelian peralatan	(XXXX)	(XXXX)
Penerimaan dari penjualan investasi	XXXX	XXXX
Pembelian investasi	(XXXX)	(XXXX)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi</i>	<u>(XXXX)</u>	<u>(XXXX)</u>
AKTIVITAS PENDANAAN		
<i>Penerimaan dari sumbangan yang dibatasi untuk</i> <i>investasi dalam dana abadi (endowment)</i>	XXXX	XXXX
Investasi bangunan	XXXX	XXXX
	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<i>Aktivitas pendanaan lain:</i>		
Bunga dibatasi untuk reinvestasi	XXXX	XXXX
Pembayaran liabilitas jangka panjang	(XXXX)	(XXXX)
	<u>(XXXX)</u>	<u>(XXXX)</u>
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</i>	<u>(XXXX)</u>	<u>(XXXX)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>

Sumber (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019)

Gambar 2.4 (Laporan Arus Kas)

Contoh Laporan Arus Kas (Metode Tidak Langsung)

ENTITAS XYZ Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
AKTIVITAS OPERASI		
Rekonsiliasi surplus (defisit) menjadi kas neto dari aktivitas operasi:		
Surplus	XXXX	XXXX
Penyesuaian untuk:		
Depresiasi	XXXX	XXXX
Penurunan piutang bunga	XXXX	XXXX
Penurunan dalam utang jangka pendek	XXXX	XXXX
Penurunan dalam pendapatan diterima di muka	XXXX	XXXX
Kas neto dari aktivitas operasi	XXXX	XXXX
AKTIVITAS INVESTASI		
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	XXXX	XXXX
Pembelian peralatan	(XXXX)	(XXXX)
Penerimaan dari penjualan investasi	XXXX	XXXX
Pembelian investasi	(XXXX)	(XXXX)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(XXXX)	(XXXX)
AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari sumbangan dibatasi untuk:		
Investasi dalam dana abadi (endowment)	XXXX	XXXX
Investasi dalam bangunan	XXXX	XXXX
Aktivitas pendanaan lain:		
Bunga yang dibatasi untuk reinvestasi	XXXX	XXXX
Pembayaran liabilitas jangka panjang	(XXXX)	(XXXX)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(XXXX)	(XXXX)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	XXXX	XXXX
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	XXXX	XXXX
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	XXXX	XXXX

Sumber (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019)

Gambar 2.4 (Laporan Arus Kas)

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan terbagi menjadi lima bagian, yaitu Catatan A, B, C, D, dan E. Dari kelima bagian tersebut, Catatan A dan B wajib diungkapkan, sedangkan Catatan C, D, dan E hanya bersifat anjuran untuk diungkapkan.

Catatan A berisi pengungkapan wajib, seperti perubahan aset dengan pembatasan menjadi aset tanpa pembatasan serta pembatasan yang bersifat tidak eksplisit. Catatan B menjelaskan tentang aset neto dengan pembatasan yang ditetapkan oleh pemberi sumber daya. Catatan C membahas aset neto yang

dibebaskan dari pembatasan pemberi sumber daya setelah terpenuhinya beban atau tujuan tertentu yang sesuai dengan pembatasan tersebut. Selanjutnya, Catatan D menguraikan pengungkapan terkait investasi. Investasi jangka panjang umumnya terbagi menjadi dua kelompok: kelompok A, yang mencakup dana abadi (donor-restricted endowment) tanpa kewajiban untuk meningkatkan nilai bersih, dan kelompok B, yang terdiri atas jumlah yang ditetapkan oleh badan perwalian sebagai investasi jangka panjang. Terakhir, Catatan E, yang dianjurkan untuk diungkapkan, berisi informasi mengenai beban yang terjadi selama periode tertentu.

Catatan A

Entitas menyajikan hibah atau wakaf, berupa kas atau aset lain, sebagai sumbangan dengan pembatasan, jika hibah atau wakaf tersebut diterima dengan persyaratan pembatasan baik untuk penggunaan aset atau atas manfaat ekonomik masa depan yang diperoleh dari aset tersebut. Jika pembatasan dari pemberi sumber daya telah kedaluwarsa, yaitu pada saat masa pembatasan telah berakhir atau pembatasan penggunaan telah dipenuhi, maka aset neto dengan pembatasan digolongkan kembali menjadi aset neto tanpa pembatasan dan disajikan dalam laporan perubahan aset neto sebagai aset neto yang dibebaskan dari pembatasan.

Entitas menyajikan hibah atau wakaf, berupa tanah, bangunan dan peralatan sebagai sumbangan tanpa pembatasan, kecuali jika ada pembatasan yang secara eksplisit menyatakan tujuan pemanfaatan aset atau penggunaan manfaat ekonomik masa depan yang diperoleh dari aset tersebut dari pemberi sumber daya. Hibah atau wakaf untuk aset tetap dengan pembatasan secara eksplisit yang menyatakan tujuan pemanfaatan aset tersebut dan sumbangan berupa kas atau aset lain yang harus digunakan untuk memperoleh aset tetap disajikan sebagai sumbangan dengan pembatasan. Jika tidak ada pembatasan secara eksplisit dari pemberi sumbangan mengenai pembatasan jangka waktu penggunaan aset tetap tersebut, pembebasan pembatasan dilaporkan pada saat aset tetap tersebut dimanfaatkan.

Catatan B

Aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya yang dibatasi tujuan atau periodenya adalah sebagai berikut:

	Jumlah
Ditujukan untuk tujuan tertentu	
Aktivitas program A:	
Pembelian peralatan	XXXX
Penelitian	XXXX
Seminar dan publikasi	XXXX
Aktivitas program B:	
Perbaikan kerusakan peralatan	XXXX
Seminar dan publikasi	XXXX
Aktivitas program C:	
Umum	XXXX
Bangunan dan peralatan	XXXX
Perjanjian perwalian tahunan	XXXX
	<u>XXXX</u>
	<i>Berlanjut</i>

Lanjutan

Ditujukan untuk periode tertentu	
Untuk periode setelah 31 Desember, 20X1	XXXX
Ditujukan untuk kebijakan pembelanjaan dan apropriasi (<i>subject to spending policy and appropriation</i>)	
Investasi tahunan, penghasilannya dibelanjakan untuk mendukung:	
Aktivitas program A	XXXX
Aktivitas program B	XXXX
Aktivitas program C	XXXX
Aktivitas lain entitas	XXXX
	<u>XXXX</u>
Ditujukan untuk apropriasi dan pengeluaran ketika peristiwa tertentu terjadi (<i>subject to appropriation and expenditure when a specified event occurs</i>)	
Dana yang penghasilannya untuk ditambahkan pada jumlah sumbangan awal hingga mencapai nilai Rp. XXXX	XXXX
Polis asuransi kematian dimana terdapat penerimaan ganti rugi asuransi atas kematian pihak yang diasuransikan untuk digunakan aktivitas umum	XXXX
	<u>XXXX</u>
Tidak ditujukan untuk apropriasi atau pengeluaran (<i>not subject to appropriation or expenditure</i>)	
tanah yang harus digunakan untuk area rekreasi	XXXX
	<u>XXXX</u>
Total aset neto dengan pembatasan	<u>XXXX</u>

Catatan C

Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan pemberi sumber daya karena terjadinya beban tertentu yang memenuhi tujuan pembatasan atau tercapainya periode waktu atau kejadian lain yang disyaratkan oleh pemberi sumber daya.

Tujuan pembatasan yang dipenuhi:

Beban program A	XXXX
Beban program B	XXXX
Beban program C	XXXX
	XXXX

Peralatan yang dibeli dan digunakan untuk program A

Pembatasan waktu yang dipenuhi:

jangka waktu yang telah dipenuhi	XXXX
Kematian pemberi sumber daya tahunan	XXXX
	XXXX
	XXXX

Pembebasan jumlah *endowment* yang disisihkan

Catatan D

Investasi dicatat pada nilai wajar. Entitas menginvestasikan kelebihan kas di atas kebutuhan harian dalam investasi jangka pendek. Pada tanggal 31 Desember 20X2, Rp.XX diinvestasikan pada investasi lancar dan menghasilkan Rp.XX per tahun. Sebagian besar investasi jangka panjang dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok A adalah dana abadi (*donor-restricted endowment*) dan tidak disiapkan untuk menaikkan nilai bersuaya. Kelompok B adalah jumlah yang oleh badan perawatan ditujukan untuk investasi jangka panjang. Tabel berikut ini menunjukkan investasi jangka panjang entitas.

	Kel A	Kel B	Lain-Lain	Total
Investasi awal tahun	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Hibah tersedia untuk investasi:				
Untuk dana abadi (<i>endowment</i>)	XXXX	-	XXXX	XXXX
Untuk dana perawatan tahunan	-	-	XXXX	XXXX
Jumlah yang ditarik untuk pemberi sumber daya tahunan yang meninggal	XXXX		XXXX	XXXX
Hasil investasi (neto, setelah dikurangi beban Rp.XX)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Jumlah tersedia untuk operasi tahun berjalan	XXXX	XXXX	-	XXXX
Penghasilan dana perawatan untuk tahun berjalan dan masa depan			XXXX	XXXX
Investasi akhir tahun	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Undang-undang dan peraturan memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan begitu banyak dana abadi (*endowment fund*) seperti dengan mempertimbangkan faktor-faktor relevan berikut: durasi dan pemeliharaan dana abadi, tujuan dari entitas berorientasi nonlaba dan dana abadi, kondisi ekonomi secara umum, kemungkinan dampak inflasi atau deflasi, total umbaran yang diperkirakan berasal dari penghasilan dan penyusutan investasi, sumber daya lain entitas berorientasi nonlaba dan kebijakan investasi. Berdasarkan kebijakan pengeluaran dana abadi, 5% dari rata-rata nilai wajar pada akhir 3 tahun sebelumnya disesuaikan, yaitu Rp.XX untuk tahun yang berakhir 31 Des 20X2.

Sumber (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019)

Gambar 2.5 (Catatan Atas Laporan Keuangan)

2.1.7 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan dan berfungsi sebagai gambaran atas kinerja perusahaan tersebut. Sebagai hasil akhir dari rangkaian proses pencatatan serta pengikhtisaran data transaksi bisnis, laporan keuangan memberikan gambaran menyeluruh tentang aktivitas keuangan perusahaan.

Laporan keuangan dijelaskan sebagai instrumen yang sangat penting dalam memperoleh informasi terkait posisi keuangan dan pencapaian yang diraih oleh perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan berperan dalam membantu pengguna mengambil keputusan ekonomi yang berkaitan dengan aspek finansial.

Menurut (Utami et al., 2024), pengertian laporan keuangan (*Financial Statements*) dan pelaporan keuangan sebagai berikut : Pengertian Laporan Keuangan (*Financial Statements*) dan Pelaporan Keuangan (*Financial Reporting*):

1. Laporan Keuangan (*Financial Statements*):

Laporan keuangan adalah informasi finansial yang disusun dan disajikan oleh manajemen suatu perusahaan untuk pihak internal maupun eksternal. Laporan ini mencerminkan aktivitas bisnis dari suatu entitas usaha serta berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Laporan keuangan terdiri dari:

- Neraca (*Balance Sheet*): Menggambarkan posisi keuangan entitas pada suatu waktu tertentu, menunjukkan keseimbangan antara aset (*assets*), kewajiban (*liabilities*), dan ekuitas (*equity*).

- Laporan Laba Rugi (*Income Statement*): Merupakan ringkasan pendapatan dan beban perusahaan selama periode tertentu.
- Laporan Perubahan Ekuitas (*Statement of Changes in Equity*): Menyajikan perubahan modal selama satu periode, termasuk laba komprehensif, investasi dari pemilik, dan distribusi kepada pemilik.
- Laporan Arus Kas (*Cash Flow Statement*): Menguraikan penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan selama satu periode tertentu.
- Catatan atas Laporan Keuangan (*Notes to Financial Statements*): Berisi penjelasan tambahan yang tidak dapat dimasukkan dalam laporan keuangan utama, termasuk prinsip, prosedur, metode, dan teknik yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.

2. Pelaporan Keuangan (*Financial Reporting*):

Pelaporan keuangan mencakup laporan keuangan yang dilengkapi dengan informasi lain yang relevan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti sumber daya perusahaan, laba, biaya saat ini (*current cost*), serta prospek perusahaan. Pelaporan ini bertujuan untuk memenuhi tingkat pengungkapan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pengguna informasi.

Menurut (Sari et al., 2022) laporan keuangan adalah informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah ringkasan dari proses pencatatan transaksi yang dilakukan menggunakan teknik dan prosedur tertentu. Laporan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kinerja perusahaan. Laporan keuangan mencakup laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dibuat dalam satu periode akuntansi. Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berkala, dengan periode yang biasanya berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember, yang dikenal sebagai periode tahun kalender. Selain tahun kalender, periode akuntansi dapat dimulai pada tanggal selain 1 Januari. Istilah "periode akuntansi" sering kali digunakan secara bergantian dengan "tahun buku." Meskipun umumnya periode akuntansi berlangsung tahunan, manajemen dapat menyusun laporan keuangan untuk periode yang lebih singkat jika diperlukan.

2.1.8 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut (Helmi, 2019) tujuan laporan keuangan meliputi :

1. Menyediakan informasi mengenai jenis dan jumlah aset (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu.
2. Memberikan informasi terkait jenis dan jumlah kewajiban serta modal perusahaan pada saat tertentu.
3. Menginformasikan jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu.

4. Menyajikan informasi tentang jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan selama periode tertentu.
5. Memberikan gambaran mengenai perubahan yang terjadi pada aset, kewajiban, dan modal perusahaan.
6. Menyampaikan informasi terkait kinerja manajemen perusahaan selama periode akuntansi.
7. Menyediakan catatan tambahan atas laporan keuangan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci.
8. Menyajikan informasi keuangan lain yang relevan dengan kebutuhan pengguna laporan.

Laporan keuangan memiliki peran penting dalam mengevaluasi kinerja usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu serta untuk menilai sejauh mana perusahaan telah mencapai tujuannya. Pada dasarnya, laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dirancang sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, laporan keuangan memiliki cakupan yang luas dan memegang posisi strategis dalam mendukung pengambilan keputusan.

Dalam praktiknya, laporan keuangan memiliki sifat tertentu:

1. Sifat historis: Laporan keuangan disusun berdasarkan data dari masa lalu atau periode yang telah berlalu. Misalnya, laporan keuangan dibuat menggunakan data dari satu, dua, atau beberapa tahun sebelumnya.

2. Sifat menyeluruh: Laporan keuangan harus disusun secara lengkap dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga mencakup seluruh informasi yang relevan.

2.1.9 Organisasi Nirlaba dan Jenis-Jenisnya

Organisasi nirlaba adalah entitas penyedia jasa yang berbeda dari organisasi swasta. Tujuan utama organisasi ini adalah memberikan layanan kepada publik, seperti dalam bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Berbeda dengan organisasi berorientasi profit yang fokus pada pencapaian keuntungan, organisasi nirlaba memandang sumber daya manusia sebagai aset paling berharga. Hal ini karena semua kegiatan organisasi tersebut dilakukan oleh, dari, dan untuk kepentingan manusia. Sebagai penyedia layanan masyarakat, organisasi nirlaba juga dapat dianggap sebagai agen perubahan yang berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari pihak pemberi yang tidak mengharapkan pengembalian atau manfaat ekonomi yang setara dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Organisasi nirlaba, atau organisasi non-profit, adalah entitas yang berfokus pada isu atau tujuan tertentu untuk menarik perhatian publik, tanpa tujuan komersial atau mencari keuntungan. Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa organisasi nirlaba adalah organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan laba atau keuntungan.

Jenis-jenis organisasi nirlaba mencakup rumah ibadah, sekolah, badan amal publik, rumah sakit dan klinik masyarakat, organisasi politik, lembaga bantuan hukum, organisasi sukarelawan, serikat pekerja, asosiasi profesional, lembaga penelitian, museum, serta beberapa instansi pemerintah.

2.2 Peneliti Terdahulu

Penelitian terkait Analisis Penerapan ISAK 35 pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Rangkuman hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Analisis	Hasil Peneliian
1.	(Sari et al., 2022)	Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan ISAK 35 pada TPQ Al-Barokah Pekalongan	Analisis data dan kualitatif	Laporan keuangan yang ada di TPQ Al-Barokah pekalongan belum sesuai dengan penyusunan laporan keuangan berdasarkan format laporan keuangan nonlaba yang ada pada ISAK 35. Laporan yang ada berupa laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan yayasan TPQ Al-Barokah sebaiknya berpedoman dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan

				oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mengetahui surplus/defisit keuangan entitas dan juga untuk mengetahui saldo kas akhir periode.
2.	(Naser et al., 2023)	Analisis Kesiapan Penerapan Laporan Keuangan berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 (Studi Kasus di Yayasan Pendidikan SMP SMA Islam Cendekia El Hakim Banda Aceh)	Metode Kualitatif dan teknik pengumpulan data	Yayasan Pendidikan SMP SMA Islam Cendekia El Hakim sudah menyusun laporan keuangan setiap bulannya namun laporan keuangan yang disajikan hanya terbatas pada informasi pemasukan dan pengeluaran kas Yayasan Pendidikan SMP SMA Islam Cendekia El Hakim. Laporan keuangan yang disajikan oleh Yayasan Pendidikan SMP SMA Islam Cendekia El Hakim belum sesuai dengan standar laporan keuangan yang sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. Hal ini dibuktikan dengan bentuk laporan keuangan yang disusun oleh Yayasan Pendidikan SMP SMA Islam Cendekia El Hakim hanya sebatas pada informasi pemasukan dan pengeluaran kas tanpa adanya informasi tentang laporan penghasilan komprehensif, laporan

				posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan aset neto, dan catatan atas laporan keuangan. Adapun Yayasan Pendidikan SMP SMA Islam Cendekia El Hakim awalnya belum sepenuhnya siap untuk menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35.
3.	(Finna Julyana et al., 2024)	Analisis Penerapan ISAK 35 tentang penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba pada Yayasan : Studi kasus pada Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlas Raudlatul Athfal "Al-Ikhlas" Sukabumi	Metode kualitatif pendekatan deskriptif	Pelaporan keuangan belum sesuai dengan ISAK 35. Akan tetapi membuat laporan keuangan yang dibuat hanya secara sederhana yaitu hanya pencatatan kas masuk dan kas keluar. Serta transaksi awal yang terjadi dicatat terlebih dahulu meskipun tidak ada kas yang harus dikeluarkan sehingga pencatatan akuntansi termasuk pada pencatatan berbasis kas. Akhir tahun pencatatan tersebut akan direkap dan menjadi laporan keuangan yang mencatat pemasukan dan pengeluaran serta disisihkan sebagai sisa uang operasional atau sebagai penentu uang tunai yang ada di bendahara selama satu periode. Dan kendala pada

				pembuatan laporan keuangan sesuai ISAK 35 pada yayasan ini dari segi faktor sumber daya manusia, dimana pada penyusunan laporan keuangan yang disusun bukan pihak yang berkompeten dalam bidang akuntansi sehingga terjadi kesulitan untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35
4.	(Anggi Sutisna & Elan Eriswanto, 2024)	Analisis Penerapan Laporan Keuangan menurut ISAK 35 dan penerapan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Arkas)	Metode Kualitatif Pendekatan Deskriptif	SMP Negeri 1 Cibitung belum menerapkan atau membuat laporan keuangan sesuai ISAK 35, namun SMP Negeri 1 Cibitung sudah menerapkan ARKAS dalam pembuatan laporan keuangan dana BOS namun masih terdapat kendala dalam penerapannya.
5.	(Dwi Krismontiyan et al., 2021)	Analisis Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Baitul Makmur Situbondo Berdasarkan ISAK NO.35	Kualitatif Deskriptif	laporan keuangan masjid belum sesuai dengan ISAK No. 35. Maka laporan keuangan Masjid di rekonstruksi sesuai dengan ISAK No.35 dengan mengidentifikasi transaksi, membuat jurnal umum, memposting ke buku besar, membuat neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal

				penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Dan hasil akhir dari proses akuntansi tersebut berupa laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
6.	(Nanda Suryadi et al., 2023)	Analisis Penerapan Akuntansi Pesantren berdasarkan ISAK 35 pada pondok pesantren Modern I'aaatuth Thalibin Perawang	Kualitatif Deskriptif	Bahwa laporan keuangan Pondok Pesantren Modern I'aaatuth Thalibin belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum didalam akuntansi syariah dan belum sesuai dengan ISAK 35.
7.	(Rintianti Kusuma Wardani, Ramadhani Irma Tripalupi, 2024)	Analisis Kesiapan Penerapan Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 di Organisasi Keagamaan	Deskriptif Analisis dan Pendekatan Kualitatif	organisasi tersebut hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran saja pada saat terjadi transaksi yang begitu sangat sederhana. Kesimpulannya, Organisasi tersebut tidak siap dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 dikarenakan beberapa kendala seperti sumber daya manusia yang kurang

				dan juga ilmu pengetahuan mengenai akuntansi tentang ISAK 35.
8.	(Zakiah & Meirini, 2022)	Kesiapan Penerapan Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan ISAK 35 di MI Sunan Ampel Mojokerto	Kualitatif Deskriptif	MI Sunan Ampel belum melakukan penerapan laporan keuangan berdasar ISAK 35 karena dilihat dari pencatatannya yang sangat sederhana yaitu mencatat kas masuk dan keluar saja.
9.	(Afifah, N., & Faturrahman, 2021)	Analisis Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi ISAK 35 pada Yayasan AN-Nahl Bintang	Deskriptif Kualitatif	Yayasan An-Nahl belum menerapkan akuntabilitas secara sempurna karena dari Lima indikator akuntabilitas, hanya dua indikator yang diterapkan pada Yayasan An-Nahl. Sedangkan untuk laporan keuangan, Yayasan An-Nahl belum menerapkan standar akuntansi ISAK 35. Laporan yang digunakan baru berupa laporan pemasukan dan juga pengeluaran secara umum.
10.	(Ananda Muhamad Tri Utama, 2022)	Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Berdasarkan ISAK NO, 35 pada Yayasan SDS Generasi Bangsa Indonesia Desa Sungai Akar	Kualitatif	Penerapan ISAK 35 pada Yayasan SDS Generasi Bangsa Indonesia belum sesuai. Pelaporan keuangan Yayasan SDS Generasi Bangsa Indonesia masih disajikan dengan sangat sederhana hanya dengan buku kas umum, yaitu

				pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas.
--	--	--	--	---

Sumber Data : (Olahan Jurnal 2020)

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah SDN 013 Tambusai Utara, yang terletak di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini akan fokus pada penerapan ISAK 35 pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah tersebut.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan pendekatan deksriptif, karena informasi yang dibutuhkan berupa deskripsi yang mencakup sejarah singkat pendirian objek, lokasi geografis objek, visi dan misi, serta struktur organisasi, yang tidak memerlukan pengukuran numerik atau tabel kalkulasi. Dari segi sifatnya, penelitian ini termasuk dalam kategori deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik, populasi, atau fenomena yang sedang diteliti. Sifat penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan pada SDN 013 Tambusai Utara.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

1. Data Kualitatif

Data Kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Cara memperoleh data kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara.

3.3.2 Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber dalam wujud data primer dan data skunder.

1. Data Primer

Data Primer merupakan jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik individu maupun kelompok, tanpa melalui perantara. Data ini dikumpulkan secara langsung untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis memperoleh data primer melalui metode survei dan wawancara kepada kepala sekolah, bendahara sekolah, komite sekolah, guru, orang tua wali murid.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari objek lain atau sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Data ini biasanya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersimpan dalam arsip atau dokumentasi dan jurnal.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahap utama dalam penelitian, karena tujuannya adalah untuk memperoleh data yang relevan (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan secara alamiah. Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Wawancara Terbuka

Wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Di mana peneliti melakukan interaksi langsung dengan responden melalui percakapan yang bersifat bebas dan fleksibel. Dalam wawancara terbuka, peneliti memberikan kesempatan kepada responden untuk menjelaskan pendapat, pengalaman, dan informasi secara lebih mendalam tanpa dibatasi oleh pertanyaan-pertanyaan yang kaku. Pihak informan yang terlibat dalam wawancara ini adalah bendahara sekolah.

b. Survei

Metode pengumpulan data primer dengan memperoleh secara langsung dari sumber lapangan penelitian. Biasanya pengumpulan data atau informasi dan fakta lapangan secara langsung tersebut melalui wawancara (interview) baik secara lisan maupun tertulis yang memerlukan adanya kontak secara tatap muka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil foto narasumber secara langsung dan mengakses data yang tersimpan dalam arsip di SDN 013 Tambusai Utara.

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah penjabaran variabel berdasarkan karakteristik yang dapat diamati, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengamatan secara akurat terhadap objek penelitian. Definisi ini

secara tidak langsung juga mengarahkan pada penggunaan alat ukur yang sesuai untuk memperoleh data yang relevan dengan variabel yang diteliti.

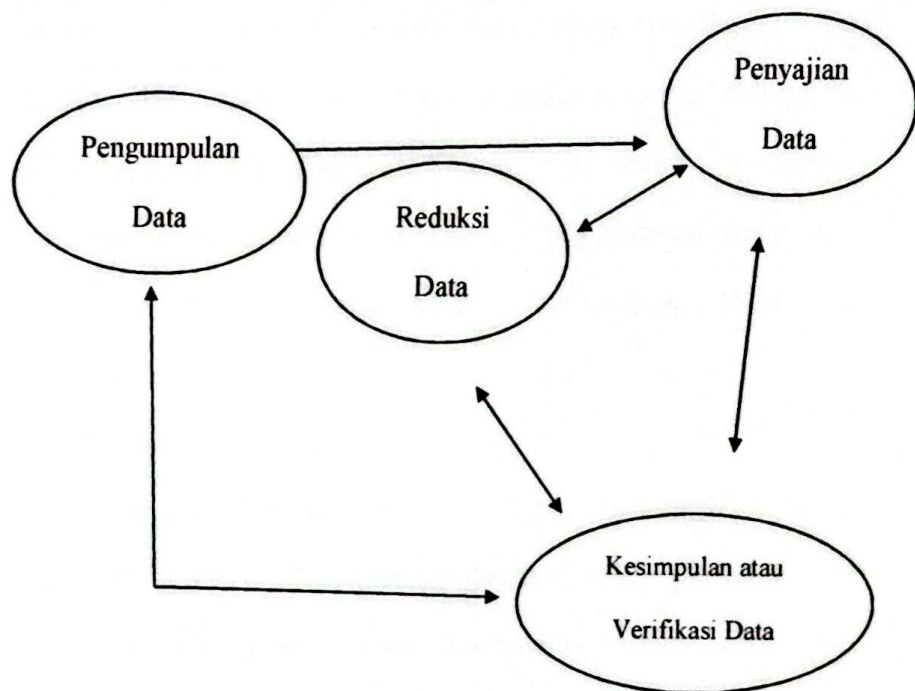
Tabel 3.5.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator
Penerapan ISAK 35	Proses pelaksanaan pedoman akuntansi ISAK 35 dalam menyusun laporan keuangan entitas nonlaba di SDN 013 Tambusai Utara.	1. Penyajian laporan keuangan(laporan posisi keuangan, aktivitas, arus kas, dan catatan). 2. Pengakuan pendapatan dan beban. 3. Penyajian aset dan kewajiban.
Pengelolaan Dana BOS	Proses perencanaan, penggunaan, pencatatan, dan pelaporan Dana BOS yang sesuai dengan aturan pemerintah dan ISAK 35.	1. Transparansi dalam pelaporan keuangan. 2. Akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan. 3. Kesesuaian laporan keuangan dengan pedoman ISAK 35.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan memberikan penjelasan menyeluruh mengenai penerapan sistem informasi akuntansi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 013 Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, serta membandingkannya dengan teori-teori terkait sistem informasi akuntansi. Berdasarkan penelitian sebelumnya, teknik-teknik sistem merupakan alat yang

digunakan untuk menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan sistem serta subsistem yang terkait. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah analisis interaktif, yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (2007). Metode ini melibatkan beberapa langkah, termasuk pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut penjelasan mengenai model analisis interaktif Miles & Huberman :



Gambar 3.6.1

Model Analisis Interaktif Miles & Huberman

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses pengumpulan data dapat berlangsung selama beberapa hari hingga berbulan-bulan, sehingga memungkinkan

terhimpunnya data yang cukup banyak. Pada tahap awal, peneliti melakukan observasi umum terhadap subjek penelitian. Metode ini memungkinkan pengumpulan data yang beragam dan kaya akan informasi (Sugiyono, 2019).

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan biasanya sangat beragam dan memuat banyak informasi yang perlu dicatat secara rinci. Proses reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih, serta menyoroti bagian-bagian yang dianggap penting. Data yang telah direduksi memberikan pandangan yang lebih terstruktur dan jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam menyusun dan menganalisis informasi yang dikumpulkan (Sugiyono, 2019).

3. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data biasanya disajikan dalam bentuk uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, atau format serupa. Teks naratif seringkali digunakan untuk menggambarkan temuan penelitian. Pendekatan ini membantu peneliti memahami situasi yang sedang diteliti serta mempermudah perencanaan langkah-langkah berikutnya (Sugiyono, 2019).

4. Kesimpulan atau Verifikasi Data:

Peneliti melakukan reduksi serta penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan akan bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak

ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deksripsi atau gambaran suatu objek yang awalnya masih tidak jelas atau samar, setelah diteliti menjadi lebih jelas. Kesimpulan ini membahas terkait penerapan ISAK 35 pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 001 Kabun. Kesimpulan yang diperoleh dalam kondisi tersebut dianggap sebagai kesimpulan yang dapat dipercaya (Sugiyono, 2019).

3.7 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 013 Tambusai Utara, yang berlokasi di jalan pelajar, Tanjung Medan, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, Riau. Penelitian ini berlangsung selama sekitar tiga bulan. Pada bulan pertama, dilakukan observasi langsung terhadap objek penelitian. Pada bulan kedua, dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Bulan ketiga, peneliti menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Tabel 3.7.1 Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Oktober				November				Desember				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																								
2.	Penelitian Awal																								
3.	Pembuatan Proposal																								
4.	Bimbingan Proposal																								
5.	Seminar Skripsi																								
6.	Bimbingan Skripsi																								
7.	Seminar hasil																								
8.	Ujian Komprehensif																								

Sumber : Peneliti (2024)